



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DINDA ASTARUL PRAMESTI**
2. Jabatan : **FUNGSIONAL AUDITOR**
3. NHK : **773367**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **725.000.000**

1. Tanah Seluas 2696 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m2/54 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **24.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI COLT TI20 SS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
2. MOTOR, HONDA GLP III Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO AT/AL115S 28 D Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **2.850.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **8.000.100**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **759.850.100**

III. HUTANG Rp. **260.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **499.850.100**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.